DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERBARU(LIST OF NEW LAWS AND REGULATIONS) Mei 2025

Jenis Peraturan / Types of Regulation	Nomor / Number	Judul	Title
PERIODE II BULAN MEI 2025 *(SECOND PERIOD OF MAY 2025)*			
PERPRES	32/2025	TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	*Employee Performance Allowance within the Ministry of Public Works*
	25/2025	TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANO INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	*Employee Performance Allowance within the Coordinating Ministry for Infrastructure and Regional Development*
PERMEN KETENAGAKERJAAN	4 Tahun 2025	OPERATOR PESAWAT UAP	*Steamship Operator*
PERMEN KOMUNIKASI DAN DIGITAL	8 Tahun 2025	LAYANAN POS KOMERSIAL	*Commercial Postal Service*
RANCANGAN PERMEN KOMUNIKASI DAN DIGITAL		PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO PADA PITA FREKUENSI RADIO 2,6 GHz	*Use of Radio Frequency Spectrum in the 2,6 Ghz Radio Frequency Band*
PERMEN KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	3 Tahun 2025	TATA NASKAH DINAS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	*Official Document Management of Coordinating Ministry for Infrastructure and Regional Development*
PERMEN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN	1 Tahun 2025	PENCABUTAN PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL	*Revocation of the Regulation of the Coordinating Minister for Human Development and Culture Number 1 of 2021 on the Organization and Work Procedures of the Secretariat of the National Social Security Council*
PERMEN HUKUM	15/2025	PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM	*Application of Risk Management within the Ministry of Law*
PERMEN LINGKUNGAN HIDUP/BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP	3 Tahun 2025	PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP/BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP	*Distribution of Government Assistance within the Ministry of Environment/Environmental Control Agency*
PERMEN PANRB	5 Tahun 2025	PENYELENGGARAAN SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL	*Organization of National Public Service Complaint Management System*
PERMEN EKONOMI KREATIF/KEPALA BADAN EKONOMI KREATIF	1 Tahun 2025	STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN EKONOMI KREATIF/BADAN EKONOMI KREATIF	*Service Standards within the Ministry of Creative Economy/Creative Economy Agency*
PERMEN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	3 Tahun 2025	PENYELENGGARAAN PARTISIPASI ANAK MELALUI FORUM ANAK	*Organization of Children's Participation through Children's Forums*
PERMEN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	7 Tahun 2025	PEMBENTUKAN NOTA KESEPAHAMAN DAN PERJANJIAN KERJA SAMA	*Establishment of Memorandum of Understanding and Cooperation Agreements*
	6 Tahun 2025	PEDOMAN UMUM PENGAWASAN INTERN	*General Guidelines for Internal Supervision*
PERMEN TRANSMIGRASI	5 Tahun 2025	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI TRANSMIGRASI NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN BIDANG TRANSMIGRASI TAHUN ANGGARAN 2025	*Amendment to the Regulation of the Minister of Transmigration Number 2 of 2025 on the Organization of the Co-Administration Duty in the Transmigration Sector for 2025 Fiscal Year*
PERMEN PERTANIAN	15/2025	PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG TATA KELOLA PUPUK BERSUBSIDI	*Implementing Regulation of the Regulation of the President Number 6 of 2025 on the Governance of Subsidized Fertilizers*
PERMEN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	4 Tahun 2025	PEDOMAN PELAKSANAAN KREDIT INDUSTRI PADAT KARYA	*Guidelines for the Implementation of Labor-Intensive Industrial Credit*
PERMEN KEUANGAN	32/2025	STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2026	*Standard Input Costs for 2026 Fiscal Year*
	31/2025	TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	*Service Tariffs of the General Service Agency of the Airport Operating Unit at the Ministry of Transportation*
	30/2025	TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN PADA KEMENTERIAN KEUANGAN	*Service Tariffs of the General Service Agency of the Plantation Fund Management Agency at the Ministry of Finance*
	29/2025	PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK EXPANSIBLE POLYSTYRENE	*Imposition of Import Duty on the Safeguarding Towards Imports of Expansible Polystyrene Products*
PERMEN KESEHATAN	3 Tahun 2025	PENEGAKAN DISIPLIN PROFESI TENAGA MEDIS DAN TENAGA KESEHATAN	*Enforcement of Professional Discipline of Medical and Health Personnel*
PERMEN KEHUTANAN	10 Tahun 2025	PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEHUTANAN	*Distribution of Government Assistance within the Ministry of Forestry*
PERMEN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	8 Tahun 2025	PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN	*Technical Guidelines for the Management of Education Unit Operational Assistance Funds*
	7 Tahun 2025	PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH	*Assignment of Teachers as Headmasters*
PERMEN PERDAGANGAN	14/2025	TATA CARA PENYELENGGARAAN, KEMUDAHAN, DAN KEIKUTSERTAAN PADA PROMOSI DAGANG DALAM RANGKA KEGIATAN PENCITRAAN INDONESIA	*Procedures for the Organization, Facilitation, and Participation in Trade Promotions for Indonesia's Imaging Activities*
	13/2025	PENCABUTAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 09 TAHUN 2023 TENTANG PETUNJUK PENGGUNAAN PAKAIAN SERAGAM PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN	*Revocation of Regulation of the Minister of Trade Number 09 of 2023 on Instructions for the Use of Employee Uniform Clothing within the Ministry of Trade*

PERMEN PERINDUSTRIAN	24/2025	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 68 TAHUN 2024 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA UNTUK BAJA LEMBARAN DAN GULUNGAN LAPIS PADUAN ALUMINIUM-SENG, SERTA BAJA LEMBARAN DAN GULUNGAN LAPIS PADUAN ALUMINIUM-SENG WARNA DAN LAPIS PADUAN ALUMINIUM-MAGNESIUM LAPIS CAT WARNA SECARA WAJIB	*Amendment to Regulation of the Minister of Industry Number 68 of 2024 on the Mandatory Enforcement of Indonesian National Standards for Aluminum-Zinc Alloy Sheet Steel and Coils, as well as Color Aluminum-Zinc Alloy Sheet Steel and Coils and Aluminum-Magnesium Alloy Color Paint Layers*
	23/2025	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 67 TAHUN 2024 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA UNTUK BAJA LEMBARAN LAPIS SENG DAN BAJA LEMBARAN LAPIS SENG WARNA SECARA WAJIB	*Amendment to Regulation of the Minister of Industry Number 68 of 2024 on the Mandatory Enforcement of Indonesian National Standards for Aluminum-Zinc Alloy Sheet Steel and Coils, as well as Color Aluminum-Zinc Alloy Sheet Steel and Coils and Aluminum-Magnesium Alloy Color Paint Layers*
	22/2025	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 64 TAHUN 2024 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA UNTUK BAJA LEMBARAN, PELAT, DAN GULUNGAN CANAI PANAS DAN BAJA LEMBARAN DAN GULUNGAN CANAI DINGIN SECARA WAJIB	*Amendment to the Regulation of the Minister of Industry Number 64 of 2024 on the Mandatory Enforcement of Indonesian National Standards for Hot-Rolled Steel Sheets, Plates and Coils and Cold-Rolled Steel Sheets and Coils*
	21/2025	PENGHARGAAN INDUSTRI HIJAU	*Green Industry Awards*
KEPMEN KETENAGAKERJAAN	126/2025	PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA KATEGORI AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS GOLONGAN POKOK AKTIVITAS ARSITEKTUR DAN KEINSINYURAN; ANALISIS DAN UJI TEKNIS BIDANG BANGUNAN HIJAU	*Determination of Indonesian National Competency Standards for Professional, Scientific and Technical Activities in the Main Categories of Architectural and Engineering Activities; Analysis and Technical Tests in the Green Building Sector*
	125/2025	PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA KATEGORI INDUSTRI MESIN PENGOLAHAN GOLONGAN POKOK INDUSTRI MESIN DAN PERLENGKAPAN YANG TIDAK TERMASUK DALAM LAINNYA (YTDL) BIDANG INDUSTRI MESIN PERIKANAN	*Determination of Indonesian National Competency Standards in the Category of Processing Machinery Industry, Principal Group of Machinery and Equipment Not Included in Others (YTDL) in the Fishing Machinery Industry Sector*
	121/2025	PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA KATEGORI INDUSTRI PENGOLAHAN GOLONGAN POKOK INDUSTRI BARANG LOGAM, BUKAN MESIN DAN PERALATANNYA BIDANG PENGELASAN	*Determination of Indonesian National Competency Standards in the Category of Processing Industry, Principal Group of Metal Goods Industry, Non-Machinery and Equipment in the Welding Sector*
	120/2025	PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA KATEGORI INFORMASI DAN KOMUNIKASI GOLONGAN POKOK AKTIVITAS PEMROGRAMAN, KONSULTASI KOMPUTER DAN KEGIATAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN ITU (YBDI) BIDANG TANGGAP INSIDEN SIBER	*Determination of Indonesian National Competency Standards in the Category of Information and Communication, Principal Group of Programming Activities, Computer Consulting and Related Activities (YBDI) in the Cyber Incident Response Sector*
KEPMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN	26/2025	NILAI AMBANG BATAS RESIDU PADA IKAN KONSUMSI HASIL PEMBUDIDAYAAN	*Residue Limits for Fish for Consumption from Fish Farming*
	25/2025	KAWASAN KONSERVASI DI PERAIRAN DI WILAYAH GUNUNGKIDUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	*Conservation Areas in Waters in the Gunungkidul of Yogyakarta Special Region*
	24/2025	KAWASAN KONSERVASI DI PERAIRAN DI WILAYAH JEMBRANA PROVINSI BALI	*Conservation Areas in Waters in the Jembrana of Bali Province*
	19/2025	TIM PENILAI KELAS KEMAMPUAN KELOMPOK PELAKU USAHA DAN PELAKU PENDUKUNG SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN	*Assessment Team for the Ability Class of Business Actors and Supporting Actors in the Marine Affairs and Fisheries Sector*
KEPMEN KEUANGAN	21/KM.4/2025	PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUAR	*Determination of Export Prices for the Calculation of Export Duty*
KEPMEN KEHUTANAN	150/2025	PENETAPAN BATAS DAERAH ALIRAN SUNGAI	*Determination of Watershed Boundaries*
	144/2025	PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENETAPAN STATUS HUTAN ADAT	*Establishment of Task Force to Accelerate the Determination of Customary Forest Status*
KEPMEN ESDM	175.K/MB.01/MEM.B/2025	HARGA MINERAL LOGAM ACUAN DAN HARGA BATUBARA ACUAN UNTUK PERIODE KEDUA BULAN MEI TAHUN 2025	*Reference Metal Mineral Prices and Reference Coal Prices for the Second Period of May 2025*
	173.K/GL.01/MEM.G/2025	PENETAPAN TAMAN BUMI (GEOPARK) NASIONAL BAYAH DOME	*Establishment of the Bayah Dome National Geopark*
	172.K/GL.01/MEM.G/2025	PENETAPAN TAMAN BUMI (GEOPARK) NASIONAL DIENG	*Establishment of the Dieng National Geopark*
	171.K/GL.01/MEM.G/2025	PENETAPAN TAMAN BUMI (GEOPARK) NASIONAL JOGJA	*Establishment of the Jogja National Geopark*
KEPMEN DALAM NEGERI	300.2.2-2138 Tahun 2025	PEMBERIAN DAN PEMUTAKHIRAN KODE, DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, DAN PULAU	*Provision and Updating of Codes, Data on Government Administrative Areas, and Islands*
KEPMEN PERDAGANGAN	1438/2025	HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTAMBANGAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR	*Export Benchmark Prices for Mining Products Subject to Export Duty*
SE MENTERI KETENAGAKERJAAN	M/5/HK.04.00/V/2025	LARANGAN PENAHANAN IJAZAH DAN/ATAU DOKUMEN PRIBADI MILIK PEKERJA/BURUH OLEH PEMBERI KERJA	*Prohibition of Withholding Diplomas and/or Personal Documents Belonging to Workers/Laborers by Employers*
SE MENTERI DALAM NEGERI	500.3/2438/SJ	PERCEPATAN PEMBENTUKAN KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH	*Acceleration of the Establishment of Red and White Village/Sub-District Cooperatives*
	400.2/2612/SJ	OPTIMALISASI PEMANFAATAN STADION SEPAK BOLA DAN PENYELENGGARAAN OLAHRAGA SEPAK BOLA DI DAERAH	*Optimization of the Utilization of Football Stadiums and the Organization of Football Sports in Regions*
	300.4/2613/SJ	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN DESK PEMBERANTASAN NARKOBA, DESK PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYELUNDUPAN DAN DESK PEMBERANTASAN PERJUDIAN DARING	*Regional Government Support in the Implementation of the Drug Eradication Desk, Smuggling Prevention and Eradication Desk and Online Gambling Eradication Desk*
SE MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS	2 Tahun 2025	PEDOMAN PELAKSANAAN INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PERCEPATAN PEMBANGUNAN, PENINGKATAN, REHABILITASI, SERTA OPERASI DAN PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI UNTUK MENDUKUNG SWASEMBADA PANGAN	*Guidelines for the Implementation of the Directive of the President of the Republic of Indonesia Number 2 of 2025 on Accelerated Development, Improvement, Rehabilitation, and Operation and Maintenance of Irrigation Networks to Support Food Self-Sufficiency*
SE MENTERI PEKERJAAN UMUM	8/SE/M/2025	PENGENDALIAN RANTAI PASOK PADA PEKERJAAN KONSTRUKSI DAN PEKERJAAN KONSTRUKSI TERINTEGRASI DALAM RANGKA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR IBU KOTA NUSANTARA DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	*Supply Chain Control in Construction Work and Integrated Construction Work for Infrastructure Development of the Nusantara Capital City at the Ministry of Public Works*
PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI	PER-7/BC/2025	PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER-25/BC/2023 TENTANG TATA LAKSANA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS MELALUI BARANG KIRIMAN	*Amendment to Regulation of the Director-General of Customs and Excise Number PER-25/BC/2023 on Procedures for the Entry and Release of Goods to and from Areas Designated as Free Trade Areas and Free Ports through Consignment Goods*

PERATURAN DIRJEN PAJAK	PER-4/PJ/2025	PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-25/PJ/2020 TENTANG BENTUK DAN ISI SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG, NOTA PENGHITUNGAN, SURAT KETETAPAN PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, SURAT KEPUTUSAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, SURAT PEMBERITAHUAN, SERTA SURAT TAGIHAN PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN	*Amendment to Regulation of the Director-General of Taxation Number PER-25/PJ/2020 on the Form and Content of Payable Tax Notification, Calculation Notes, Land and Building Tax Assessment, Land and Building Tax Overpayment Decision, Notification Letters, and Land and Building Tax Bills*
KEPUTUSAN DIRJEN PENANGGULANGAN PENYAKIT	HK.02.02/C/478/2025	PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN INTERVENSI KUALITAS KESEHATAN LINGKUNGAN DI DESA, LEMBAGA PENDIDIKAN KEAGAMAAN, DAN SENTRA PANGAN JAJANAN TAHUN 2025	*Technical Guidelines for the Distribution of Environmental Health Quality Intervention Assistance in Villages, Religious Educational Institutions, and Food Centers in 2025*
KEPUTUSAN DIRJEN BEA DAN CUKAI	KEP-73/BC/2025	PENERAPAN SECARA PENUH (MANDATORY) CEISA 4.0 TAHAP KEDUAPULUH	*Mandatory Application of CEISA 4.0 Twentieth Stage*
INSTRUKSI DIRJEN BEA DAN CUKAI	INS-1/BC/2025	MEKANISME PENETAPAN PARAMETER TARGETING BERDASARKAN MANAJEMEN RISIKO DALAM RANGKA PELAYANAN DAN PENGAWASAN IMPOR BARANG KIRIMAN	*Mechanism for the Determination of Targeting Parameters Based on Risk Management for Services and Supervision of Imports of Consignment Goods*
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BI	10 Tahun 2025	PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 24/21/PADG/2022 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN REKENING GIRO DI BANK INDONESIA	*Amendment to Regulation of the Members of the Board of Governors Number 24/21/PADG/2022 on Implementing Rgulations on Giro Accounts at Bank Indonesia*
PERATURAN OJK	12 Tahun 2025	PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DAN PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN MANAJER INVESTASI	*Application of Risk Management and Assessment of the Health Level of Investment Managers*
	11 Tahun 2025	PENYELENGGARAAN USAHA LEMBAGA PENJAMIN	*Organization of the Guarantee Institutions Business*
	10 Tahun 2025	PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 1/POJK.05/2017 TENTANG PERIZINAN USAHA DAN KELEMBAGAAN LEMBAGA PENJAMIN	*Amendment to the Regulation of the Financial Services Authority Number 1/POJK.05/2017 on Business Licensing and Institutionalization of Guarantee Institutions*
	9 Tahun 2025	DEMATERIALISASI EFEK BERSIFAT EKUITAS DAN PENGELOLAAN ASET YANG TIDAK DIKLAIM DI PASAR MODAL	*Dematerialization of Equity Securities and Management of Unclaimed Assets in the Capital Market*
PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI	4 Tahun 2025	TAHAPAN, KEGIATAN, DAN JADWAL PENANGANAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI	*Stages, Activities, and Schedules for Handling Cases of Disputes on the Results of the General Elections of Governors, Regents, and Mayors after the Decision of the Constitutional Court*
PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	2 Tahun 2025	PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH MELALUI PENYEDIA DENGAN PENUNJUKAN LANGSUNG DALAM PELAKSANAAN PROGRAM PRIORITAS PEMERINTAH, BANTUAN PEMERINTAH, DAN/ATAU BANTUAN PRESIDEN BERDASARKAN ARAHAN PRESIDEN	*Guidelines for the Implementation of Procurement of Government Goods/Services through Providers by Direct Appointment in the Implementation of Government Priority Programs, Government Assistance, and/or Presidential Assistance Based on Presidential Directives*
PERATURAN KEJAKSAAN	1 Tahun 2025	PENGADAAN BARANG/JASA YANG BERSIFAT RAHASIA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA	*Procurement of Confidential Goods/Services within the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia*
PERATURAN BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL	5 Tahun 2025	PENYELENGGARAAN PLATFORM DIGITAL GEOINFORMATIKA	*Organization of Digital Geoinformatics Platform*
PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	15/2025	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	*Amendment to Regulation of the National Agency of Drug and Food Control Number 6 of 2022 on Official Document Management within the National Agency of Drug and Food Control*
	14/2025	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR 27 TAHUN 2021 TENTANG PERSYARATAN PANGAN OLAHAN BERASAM RENDAH DIKEMAS HERMETIS	*Amendment to Regulation of the National Agency of Drug and Food Control Number 27 of 2021 on Requirements for Hermetically Packaged Low Acid Processed Food*
PERATURAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	3 Tahun 2025	RAMBU DAN PAPAN INFORMASI BENCANA	*Disaster Information Signs and Boards*
PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI	10 Tahun 2025	PERUBAHAN KESEMBILAN ATAS PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI NOMOR 13 TAHUN 2024 TENTANG PENGATURAN PROGRAM STUDI YANG TERCAKUP DALAM LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI	*Ninth Amendment to the Regulation of the National Accreditation Agency for Higher Education Number 13 of 2024 on the Arrangement of Study Programs Covered by Independent Accreditation Institution*
	9 Tahun 2025	PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI NOMOR 13 TAHUN 2024 TENTANG PENGATURAN PROGRAM STUDI YANG TERCAKUP DALAM LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI	*Eight Amendment to the Regulation of the National Accreditation Agency for Higher Education Number 13 of 2024 on the Arrangement of Study Programs Covered by Independent Accreditation Institution*
KEPUTUSAN DIREKSI PT BURSA EFEK INDONESIA	Kep-00007/BEI/05-2025	KEBIJAKAN BIAYA DAN INSENTIF BAGI LIQUIDITY PROVIDER SAHAM	*Policy on Fees and Incentives for Stock Liquidity Providers*
	Kep-00006/BEI/05-2025	KETENTUAN PARAMETER EFEK LIQUIDITY PROVIDER SAHAM SERTA EFEK INSENTIF LIQUIDITY PROVIDER SAHAM DAN KEWAJIBAN KUOTASI LIQUIDITY PROVIDER SAHAM	*Provision of the Securities Parameters of Stock Liquidity Providers and Securities Incentives of Stock Liquidity Providers and Quotation Obligations of Stock Liquidity Providers*
SE KPEI	SE–003/DIR/KPEI/0425	KRITERIA WATCHLIST EFEK REPO	*Repo Securities Watchlist Criteria*
	SE–002/DIR/KPEI/0425	KRITERIA EFEK YANG DAPAT DITRANSAKSIKAN MELALUI FASILITAS TRIPARTY REPO	*Criteria for Securities That Can be Transacted through Triparty Repo Facilities*
SE KEPALA BAPETEN	0744/2025	KETENTUAN KHUSUS (SPECIAL ARRANGEMENT) DALAM PENGANGKUTAN ZAT RADIOAKTIF TERBUNGKUS YANG TIDAK DIGUNAKAN	*Special Arrangements in the Transportation of Unused Wrapped Radioactive Substances*
RANCANGAN SE OJK		PENYEDIAAN DANA PESANAN, VERIFIKASI KETERSEDIAAN DANA, ALOKASI EFEK UNTUK PENJATAHAN TERPUSAT, DAN PENYELESAIAN PEMESANAN EFEK DALAM PENAWARAN UMUM EFEK BERSIFAT EKUITAS BERUPA SAHAM SECARA ELEKTRONIK	*Provision of Order Funds, Verification of Fund Availability, Allocation of Securities for Centralized Allotment, and Settlement of Securities Orders in the Public Offering of Equity Securities in the Form of Shares Electronically*
SURAT BADAN PENGELOLA INVESTASI DAYA ANAGATA NUSANTARA	5-027 /DI-SP/V/2025	ARAHAN TERKAIT PELAKSANAAN RUPS DAN AKSI KORPORASI BUMN DAN ANAK USAHA BUMN	*Directives Related to the Implementation of RUPS and Corporate Actions of BUMN and Subsidiaries of BUMN*
PERIODE I BULAN MEI 2025 *(FIRST PERIOD OF MAY 2025)*			
PERPRES	46/2025	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG/ JASA PEMERINTAH	*Second Amendment to Regulation of the President Number 16 of 2018 on Procurements of Government Goods and Services*

PERMEN HUKUM	14/2025	PEMBANGUNAN DAN EVALUASI ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KEMETERIAN HUKUM	*Development and Evaluation of Integrity Zones towards Corruption-Free Zone and Clean and Service-Oriented Bureaucracy Zone within the Ministry of Law*
	13/2025	PENGESAHAN KOPERASI	*Verification of Cooperatives*
	11 Tahun 2025	PENILAIAN INDEKS REFORMASI HUKUM PADA KEMENTERIAN LEMBAGA DAN PEMERINTAH DAERAH	*Assessment of the Legal Reform Index at Ministries, Institutions, and Regional Governments*
	7 Tahun 2025	PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM	*Implementation of Integrated Government Internal Control Systems within the Ministry of Law*
PERMEN PERINDUSTRIAN	20/2025	PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA UNTUK KRIMER NABATI BUBUK SECARA WAJIB	*Mandatory Enforcement of Indonesian National Standard for Powdered Non-Dairy Creamer*
	19/2025	PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA UNTUK PATI JAGUNG SECARA WAJIB	*Mandatory Enforcement of Indonesian National Standard for Corn Starch*
	18/2025	PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA UNTUK METER AIR SECARA WAJIB	*Mandatory Enforcement of Indonesian National Standard for Water Meter*
	17/2025	PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA UNTUK TALI KAWAT BAJA DAN TALI KAWAT BAJA UNTUK MINYAK DAN GAS BUMI SECARA WAJIB	*Mandatory Enforcement of Indonesian National Standard for Steel Wire and Steel Wire for Oil-and-Gas*
	16/2025	PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA UNTUK GARAM KONSUMSI BERIODIUM SECARA WAJIB	*Mandatory Enforcement of Indonesian National Standard for Iodized Table Salt*
	15/2025	PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA UNTUK KACA PENGAMAN UNTUK KENDARAAN BERMOTOR SECARA WAJIB	*Mandatory Enforcement of Indonesian National Standard for Safety Glass for Motor Vehicles*
	14/2025	PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA UNTUK KERAMIK BERGLASIR ALAT MAKAN DAN MINUM SECARA WAJIB	*Mandatory Enforcement of Indonesian National Standard for Glazed Ceramics for Ceramic Tableware and Drinkware*
PERMEN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	6 Tahun 2025	PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA	*Development of Competencies for Civil Servants*
PERMEN AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL	6 Tahun 2025	ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL	*Organization and Work Procedures of the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency*
	5 Tahun 2025	PELIMPAHAN KEWENANGAN PENETAPAN HAK ATAS TANAH DAN KEGIATAN PENDAFTARAN TANAH	*Delegation of Authority for Land Rights Determination and Land Registration Activities*
PERMEN ESDM	13/2025	RUANG BEBAS JARINGAN TRANSMISI TENAGA LISTRIK DAN KOMPENSASI ATAS TANAH, BANGUNAN, DAN/ATAU TANAMAN YANG BERADA DI BAWAH RUANG BEBAS JARINGAN TRANSMISI TENAGA LISTRIK	*Electricity Transmission Network Clear Space and Compensation for Land, Buildings, and/or Plants under the Electricity Transmission Network Clear Space*
	12 Tahun 2025	ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	*Organization and Work Procedures of the Ministry of Energy and Mineral Resources*
PERMEN KEUANGAN	28/2025	PENGELOLAAN DANA BERSAMA PENANGGULANGAN BENCANA	*Management of Joint Funds for Disaster Mitigation*
	25/2025	KETENTUAN KEPABEANAN ATAS IMPOR BARANG PINDAHAN	*Customs Provisions on Imports of Personal Effects*
PERMEN LINGKUNGAN HIDUP/ BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP	2 Tahun 2025	PENGEMBANGAN SISTEM PEMBAYARAN JASA LINGKUNGAN HIDUP	*Development of Environmental Services Payment System*
PERMEN TRANSMIGRASI	4 Tahun 2025	ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN TRANSMIGRASI	*Organization and Work Procedures of Technical Implementing Units in the Ministry of Transmigration*
	3 Tahun 2025	BENTUK PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL DAN TATA CARA PEMBERIAN IZIN PENANAMAN MODAL DI KAWASAN TRANSMIGRASI	*Form of Investment Implementation and Procedures for Granting Investment Licenses in Transmigration Zones*
PERMEN PERTANIAN	14/2025	PERSYARATAN PEMASUKAN TERNAK DALAM HAL TERTENTU YANG BERASAL DARI NEGARA ATAU ZONA DALAM SUATU NEGARA ASAL PEMASUKAN	*Requirements for the Entry of Livestock in Certain Instances Originating from Countries or Zones within Countries of Origin of Imports*
	12 Tahun 2025	PELAYANAN PERKAWINAN TERNAK	*Livestock Breeding Services*
PERMEN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	5 Tahun 2025	BESARAN PENGHASILAN DAN KRITERIA MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH SERTA PERSYARATAN KEMUDAHAN PEMBANGUNAN DAN PEROLEHAN RUMAH	*Income Rates and Criteria for Low-Income Communities, as well as Requirements for Ease of Housing Development and Acquisition*
	4 Tahun 2025	PENGELOLAAN RUMAH SUSUN MILIK SERTA PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SATUAN RUMAH SUSUN	*Management of Owned Multi-Story Housing Units and Association of Owners and Occupants of Multi-Story Housing Units*
	3 Tahun 2025	PELAYANAN ADVOKASI HUKUM	*Legal Advocacy Services*
	2 Tahun 2025	PEMBENTUKAN DAN EVALUASI PRODUK HUKUM	*Formation and Evaluation of Legal Products*
KEPMEN PEKERJAAN UMUM	464/KPTS/M/2025	PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 2797/KPTS/M/2024 TENTANG PENETAPAN RUAS JALAN/JEMBATAN NON NASIONAL DAN JEMBATAN GANTUNG DALAM RANGKA PERCEPATAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR	*Amendment to Decree of the Minister of Public Works and Public Housing Number 2797/Kpts/M/2024 on the Designation of Non-National Roads/Bridges and Suspension Bridges in the Context of Expediting the Implementation of Infrastructure Construction*
	447/KPTS/M/2025	PENDELEGASIAN KEWENANGAN DI BIDANG PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI	*Delegation of Authority in the Field of Construction Service Development*
KEPMEN PERTANIAN	178/KPTS./HK.150/M/04/2025	JENJANG KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA BIDANG HORTIKULTURA	*Indonesian Qualifications Framework in the Horticulture Sector*
	177/KPTS./HK.150/M/04/2025	JENJANG KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA BIDANG PRODUKSI TERNAK RUMINANSIA	*Indonesian Qualifications Framework in the Ruminant Livestock Production Sector*
KEPMEN KETENAGAKERJAAN	89/2025	PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA KATEGORI AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS GOLONGAN POKOK AKTIVITAS ARSITEKTUR DAN KEINSINYURAN; ANALISIS DAN UJI TEKNIS BIDANG KEINSINYURAN PETERNAKAN	*Determination of Indonesian National Work Competency Standards for the Professional, Scientific, and Technical Activities Category of the Main Class of Architecture and Engineering Activities; Analysis and Technical Testing in the Livestock Engineering Sector*
KEPMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN	20/2025	NAMA LAYANAN PUBLIK DAN PRODUK LAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	*Names of Public Services and Public Service Products in the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries*
	15/2025	WILAYAH KERJA DAN PENGOPERASIAN PELABUHAN PERIKANAN PANGKALAN PENDARATAN IKAN DUMAI, KOTA DUMAI, PROVINSI RIAU	*Working and Operation Area of the Fishery Port of Dumai Fish Landing Base, Dumai City, Riau Province*

KEPMEN PERDAGANGAN	594/2025	DAFTAR MEREK REFINED, BLEACHED, AND DEODORIED PALM OLEIN DALAM KEMASAN BERMEREK DAN DIKEMAS DENGAN BERAT NETTO KURANG DARI ATAU SAMA DENGAN 25 KG	*The List of Brands of Refined, Bleached, and Deodorized Palm Olein in Branded Packaging that are Packaged in Net Weight of Less than or Equal to 25 Kg*
	593/2025	HARGA REFERENSI CRUDE PALM OIL YANG DIKENAKAN BEA KELUAR DAN TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT	*Reference Price for Crude Palm Oil Subject to Export Duty and Service Tariffs at the General Service Agency of the Palm-Oil Plantation Fund Management Agency*
	592/2025	HARGA PATOKAN EKSPOR DAN HARGA REFERENSI ATAS PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR	*Export Benchmark Prices and Reference Prices for Agricultural and Forestry Products Subject to Export Duty*
	591/2025	HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTAMBANGAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR	*Export Benchmark Prices for Mining Products Subject to Export Duty*
KEPMEN KEUANGAN	19/KM.4/2025	PENUNDAAN PELAKSANAAN PENGAWASAN KETENTUAN PEMBATASAN IMPOR DAN EKSPOR BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 18/KM.4/2025 TENTANG BARANG YANG DIBATASI UNTUK DIIMPOR DAN DIEKSPOR BERDASARKAN PERATURAN BADAN KARANTINA INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG JENIS KOMODITAS PERIKSA KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN BADAN KARANTINA INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN KARANTINA INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG JENIS KOMODITAS PERIKSA KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN	*Postponement of the Implementation of Supervision of Provisions on Export and Import Prohibitions Based on Decree of the Minister of Finance Number 18/Km.4/2025 on Goods Restricted for Import and Export Based on Regulation of the Indonesian Quarantine Agency Number 1 of 2024 on Types of Commodities Requiring Animal, Fish, and Plant Quarantine Inspection as Amended by Regulation of the Indonesian Quarantine Agency Number 5 of 2025 on Amendment to Regulation of the Indonesian Quarantine Agency Number 1 of 2024 on Types of Commodities Requiring Animal, Fish, and Plant Quarantine Inspection*
	18/KM.4/2025	BARANG YANG DIBATASI UNTUK DIIMPOR DAN DIEKSPOR BERDASARKAN PERATURAN BADAN KARANTINA INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG JENIS KOMODITAS WAJIB PERIKSA KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN BADAN KARANTINA INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN KARANTINA INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG JENIS KOMODITAS WAJIB PERIKSA KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN	*Goods Restricted for Import and Export Based on Regulation of the Indonesian Quarantine Agency Number 1 of 2024 on Types of Commodities Requiring Animal, Fish, and Plant Quarantine Inspection as Amended by Regulation of the Indonesian Quarantine Agency Number 5 of 2025 on Amendment to Regulation of the Indonesian Quarantine Agency Number 1 of 2024 on Types of Commodities Requiring Animal, Fish, and Plant Quarantine Inspection*
	17/KM.4/2025	PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16/KM.4/2025 TENTANG PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUAR	*Amendment to Decree of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Decree Number 16/Km.4/2025 on Determination of Export Prices for the Calculation of Exit Duty*
KEPMEN ESDM	169.K/MB.01/MEM.B/2025	HARGA MINERAL LOGAM ACUAN DAN HARGA BATUBARA ACUAN UNTUK PERIODE PERTAMA BULAN MEI TAHUN 2025	*Reference Metal Mineral Prices and Reference Coal Prices for the First Period of May 2025*
SE MENTERI PANRB	4 Tahun 2025	TEKNIS PENGUSULAN UNIT KERJA/SATUAN KERJA MENUJU WBK/WBBM DAN PELAKSANAAN SURVEI MANDIRI ZONA INTEGRITAS TAHUN 2025	*Technical Proposal for Work Unit/Work Taskforce Towards Corruption-Free Zone/Clean and Service-Oriented Bureaucracy Zone and Implementation of Independent Surveys of Integrity Zones for 2025*
SE MENTERI PEKERJAAN UMUM	7/SE/M/2025	MEKANISME PELAPORAN EVALUASI DAN PENGECEKAN PEMENUHAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL JALAN TOL	*Mechanism for Reporting Evaluation and Checking Compliance with Minimum Service Standards for Toll Roads*
KEPUTUSAN DIRJEN PERHUBUNGAN LAUT	KP-DJPL 282/2025	PELAKSANAAN PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN/ ATAU PENAGIHAN PENERIMAAN JASA PENGGUNAAN SBNP/UANG RAMBU OLEH DISTRIK NAVIGASI DALAM RANGKA MENDUKUNG PENERAPAN SISTEM SINGLE BILLING PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DI PELABUHAN	*Implementation of Collection, Deposit, and/or Billing of Service Receipt for the Use of Aids to Navigation/Signal Fee by Navigation District in the Context of Supporting the Implementation of Single Billing System for Non-Tax State Revenue at Ports*
KEPUTUSAN DIRJEN BEA DAN CUKAI	KEP-66/BC/2025	PENERAPAN SECARA PENUH (MANDATORY) CEISA 4.0 TAHAP KESEMBILANBELAS	*The Mandatory Implementation of CEISA 4.0 Phase Nineteen*
SURAT EDARAN DIRJEN PERHUBUNGAN LAUT	SE-DJPL 11/2025	SELERA RISIKO PADA DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT	*Risk Appetite at the Directorate General of Sea Transportation*
PERATURAN BPOM	13/2025	PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	*Implementation of the Granting of Performance Allowances for Employees in the National Agency of Drug and Food Control*
	12 Tahun 2025	OBAT OBAT TERTENTU YANG SERING DISALAHGUNAKAN	*Certain Drugs That Are Frequently Misused*
	11 Tahun 2025	STANDAR CARA PEMBUATAN OBAT YANG BAIK DI UNIT PENGELOLA DARAH DAN BANK PLASMA	*Good Manufacturing Practice Standards in Blood Management Unit and Plasma Bank*
	10 Tahun 2025	PEDOMAN VERIFIKASI METODE ANALISIS OBAT DAN BAHAN OBAT	*Guidelines for Verification of Drug and Drug Ingredient Analysis Methods*
	9 Tahun 2025	PEDOMAN KAJIAN RISIKO KEAMANAN DAN ATAU MUTU OBAT DAN BAHAN OBAT	*Guidelines for Risk Assessment of the Safety and/or Quality of Drugs and Drug Ingredients*
RANCANGAN PERATURAN BPOM		PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR 14 TAHUN 2024 TENTANG PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN YANG DIEDARKAN SECARA DARING	*Amendment to Regulation of the National Agency of Drug and Food Control Number 14 of 2024 on Supervision of Drugs and Food Distributed Online*
PERATURAN BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL	2 Tahun 2025	TATA KELOLA DATA RISET DAN INOVASI	*Governance of Research and Innovation Data*
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BI	9 Tahun 2025	LEMBAGA PENDUKUNG PASAR UANG DAN PASAR VALUTA ASING DAN PROFESI PENUNJANG PASAR UANG DAN PASAR VALUTA ASING	*Supporting Institutions for Money Market and Foreign Exchange Market and Supporting Professions in Money Market and Foreign Exchange Market*
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN	8 Tahun 2025	PENERBITAN DAFTAR EFEK SYARIAH DAN DAFTAR EFEK SYARIAH LUAR NEGERI	*Publication of Sharia Securities List and Foreign Sharia Securities List*
RANCANGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN		PENYELENGGARAAN TEKNOLOGI INFORMASI OLEH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT DAN BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH	*Implementation of Information Technology by Rural Banks and Sharia Rural Banks*
PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI	2 Tahun 2025	TAHAPAN, KEGIATAN, DAN JADWAL PENANGANAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI	*Stages, Activities, and Schedule for Handling Cases of Disputes over the Result of the General Elections of Governors, Regents, and Mayors After the Constitutional Court Decision*

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS	4 Tahun 2025	PEDOMAN PENERBITAN, PERUBAHAN, DAN PENCABUTAN TANDA PENGENAL KHUSUS BADAN USAHA DAN/ATAU PELAKU USAHA DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS	*Guidelines for the Issuance, Amendment, and Revocation of Special Identification for Business Entities and/or Business Actors in Special Economic Zones*
	2 Tahun 2025	PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN SEKRETARLS JENDERAL DEWAN NASIONAL KAWAWASAN EKOOMI KHUSUS NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEGIATAN UTAMA KAWASAN EKONOMI KHUSUS	*Fifth Amendment to Regulation of the Secretary General of the National Council of Special Economic Zones Number 1 of 2022 on Changes in Main Activities of Special Economic Zones*
PERATURAN DIREKSI KPEI	X-2	FASILITAS TRIPARTY REPO	*Triparty Repo Facility*
	II-11	KOMITE HAIRCUT	*Haircut Committee*
PERATURAN DIREKSI BEI	III-Q	LIQUIDITY PROVIDER SAHAM DI BURSA	*Liquidity Provider for Stocks on the Exchange*
	II-Q	KEGIATAN LIQUIDITY PROVIDER SAHAM DI BURSA	*Activities of Liquidity Provider for Stocks on the Exchange*
	I-P	PENCATATAN WARAN TERSTRUKTUR DI BURSA	*Listing of Structured Warrants on the Exchange*
PERATURAN DIREKSI PT PLN (PERSERO)	0003.P/DIR/2025	PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKSI PT PLN (PERSERO) NOMOR 0182.P/DIR/2022 TENTANG KEBIJAKAN STRATEGIS KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA, KESELAMATAN INSTALASI, DAN KESELAMATAN MASYARAKAT UMUM	*Amendment to Regulation of the Board of Directors of PT PLN (Persero) Number 0182.P/Dir/2022 on Strategic Policies on Occupational Safety and Health, Installation Safety, and General Public Safety*
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA INDONESIA	677/2025	PENETAPAN JENIS HAMA DAN PENYAKIT IKAN KARANTINA, ORGANISME PENYEBAB, GOLONGAN DAN MEDIA PEMBAWA	*Determination of Fish Quarantine Pests and Diseases, Causative Organisms, Categories, and Vectors*
KEPUTUSAN KEPALA BPOM	278/2025	PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2025	*Program for the Preparation of Laws and Regulations in the National Agency of Drug and Food Control for 2025*
KEPUTUSAN DIREKSI BEI	Kep-00005/BEI/04-2025	PELAPORAN TRANSAKSI EFEK MELALUI SISTEM PENERIMA LAPORAN TRANSAKSI EFEK (SISTEM PLTE)	*Securities Transaction Reporting Through the Securities Transaction Report Recipient (Plte System)*
KEPUTUSAN DIREKSI PT KPEI	KEP-040/DIR/KPEI/0525	KEBIJAKAN PERUBAHAN JATUH TEMPO PEMBAYARAN BIAYA LAYANAN JASA KLIRING PERDAGANGAN EFEK BERSIFAT UTANG DAN SUKUK	*Policy on Changes to the Due Date for Payment of Service Fees for Clearing Services for Debt Securities and Sukuk*
	Kep-030/DIR/KPEI/0425	KETENTUAN DAN PROSEDUR (RULE BOOK) PENYELENGGARAAN CENTRAL COUNTERPARTY	*Provisions and Procedures (Rule Book) for the Operation of the Central Counterparty*
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN	4/SEOJK.07/2025	PELAPORAN PENYELENGGARA INOVASI TEKNOLOGI SEKTOR KEUANGAN YANG MEMILIKI IZIN USAHA DI OTORITAS JASA KEUANGAN	*Reporting of Financial Sector Technology Innovation Organizers Holding Business Licenses with the Financial Services Authority*
	3/SEOJK.04/2025	PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 25/SEOJK.04/2021 TENTANG PEDOMAN PERLAKUAN AKUNTANSI PERUSAHAAN EFEK	*Amendment to Circular of the Financial Services Authority Number 25/Seojk.04/2021 on Guidelines for Accounting Treatment of Securities Companies*
RANCANGAN SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN		PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN PIHAK UTAMA PERUSAHAAN INDUK KONGLOMERASI KEUANGAN NONOPERASIONAL	*Fit-and-Proper Test for Major Parties in Non-Operating Financial Conglomerate Holding Companies*
SE DIREKSI BEI	SE-00002/BEI/04-2025	INSENTIF BIAYA HAK AKSES SISTEM PLTE BAGI PARTISIPAN YANG MERUPAKAN PENGGUNA JASA SISTEM PENYELENGGARA PASAR ALTERNATIF	*Incentives for Access Fees to the Plte System for Participants Who Are Users of Alternative Market Organizer Services*